

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEDIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Bupati dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang Komunikasi dan Informatika melalui misi Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 13 “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini berupaya memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat dinas selama tahun anggaran 2021 dan juga perkembangan kinerja Dinas Kominfo dalam RPJMD 2016-2021, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kediri, Desember 2021

  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri  
**IBNU IMAD, S.Sos**  
Pembina/IV-a  
NIP. 19721010 200501 1 014

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Dinas Kominfo.....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Organisasi .....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis .....	10
B. Program dan Kegiatan .....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran .....	34
C. Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi .....	39
BAB IV. PENUTUP .....	42

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

### **B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMINFO**

Kedudukan, tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut :

#### **B.1 Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

#### **B.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **B.3 Peran Strategis**

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo memiliki peran strategis antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Kominfo memiliki tugas pokok dan fungsi membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi Kabupaten Kediri. Dinas Kominfo berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Kediri sebagai *smart city* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Dinas Kominfo berperan penting dalam diseminasi informasi dan publikasi, tidak hanya melalui media massa, media offline tetapi juga media online berbasis internet seperti mempublikasikan informasi – informasi publik melalui website, media sosial.
3. Dinas Kominfo menjalankan fungsi – fungsi Pemberdayaan *Mass Media, Penerbitan dan Informasi Mobile* sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menyebarkan informasi pembangunan melalui media – media massa tersebut.
4. Dinas Kominfo menjalankan fungsi Pemberdayaan Informasi Masyarakat melalui media – media *Bakoimas, Pertunjukan Rakyat, Siaran Radio, dan Pemutaran Film*. Melalui media – media itu, Dinas Kominfo dapat menyebarkan berbagai informasi pembangunan dan pemerintahan kepada elemen – elemen masyarakat hingga ke desa – desa.
5. Sesuai dengan Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang

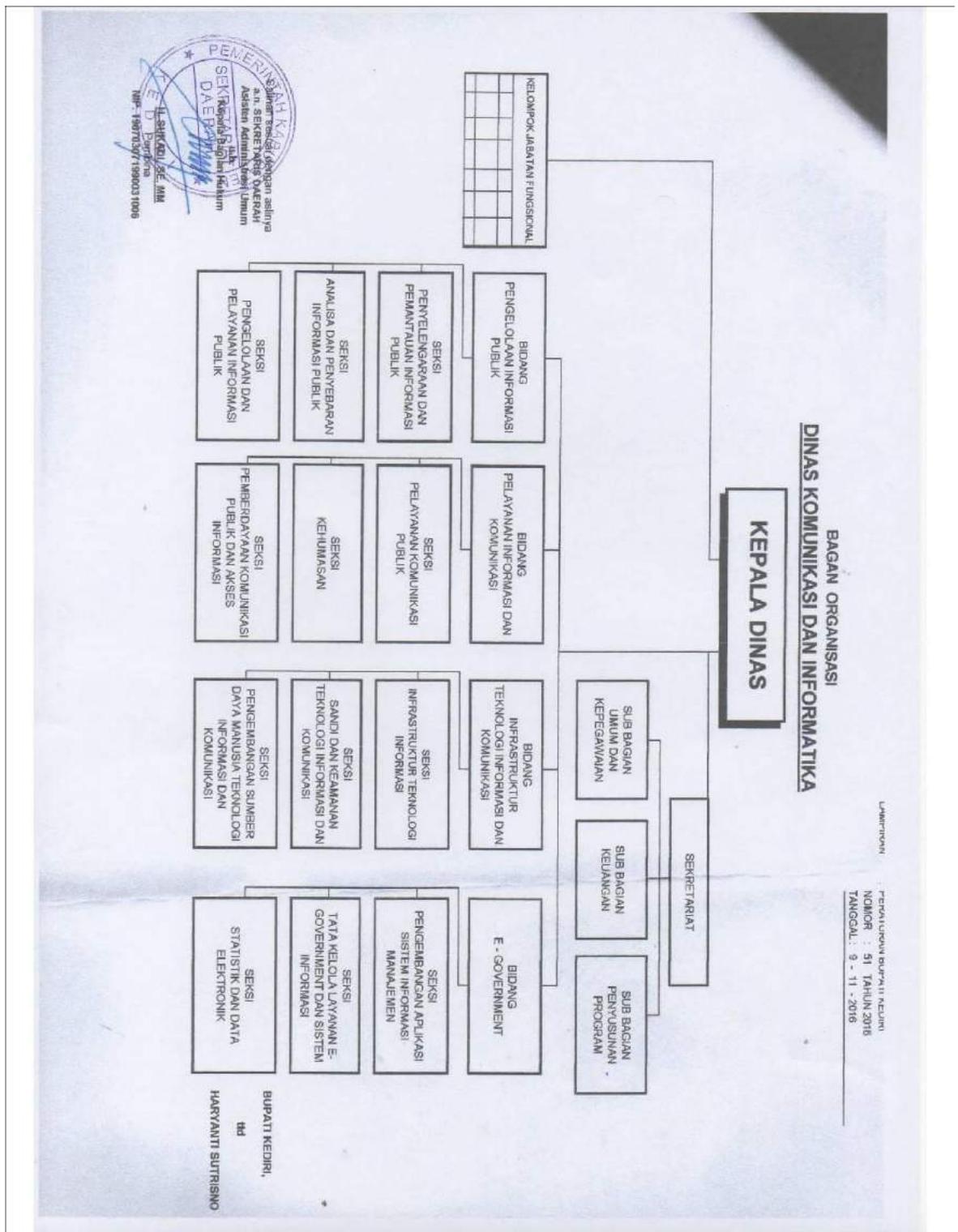
Standart Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo menjadi sekretaris dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi, dan kelompok Pejabat Fungsional yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi :
  - a. Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik
  - b. Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Komunikasi Publik
  - b. Seksi Kehumasan
  - c. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi
5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :
  - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
  - b. Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang E-Government
  - a. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
  - b. Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi
  - c. Seksi Statistik dan Data Elektronik
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Juru Kominfo.

Struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri digambarkan dalam bagan berikut :



#### D. SUMBER DAYA ORGANISASI

Keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditopang oleh kekuatan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo pada tahun 2021 telah memiliki sumberdaya berupa :

##### D.1 Sumber Daya Manusia

Data personil Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2021 baik PNS maupun Non PNS (Tenaga Honorer) bisa digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Data Personil Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2021**

No.	Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir	Jabatana/Gol Ruang	Pendidikan Terakhir
<b>PNS</b>			
1	Ibnu Imad, S.Sos NIP. 19721010 200501 1 014 Kediri, 10/10/1972	Plt. Kepala Dinas IV-a	S1
2	Wikainun, SE, M.Si. NIP. 19641231 199703 1 052 Nganjuk, 12/31/1964	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi IV-a	S2
3	Suwanto, S.Kom. NIP. 19730415 200501 1 011 Kediri, 4/15/1973	Kepala Bidang Infrastruktur III-d	S1
4	Farman, S.Sos. M.Si. NIP. 19680718 199203 1 009 Ujung Pandang, 7/18/1968	Kepala Bidang E-Government IV-a	S2
5	Djoko Prasetyo, SH,MM. NIP. 19640329 199203 1 005 Kediri, 3/29/1964	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian IV-a	S2
6	Krisna Setiawan, S.AP, M.Si NIP. 19840127 200604 1 005 Kediri, 1/27/1984	Non Aktif IV-a	S2
7	Yulia Puji Rahayu, SE. NIP. 19790718 201001 2 003 Kediri, 7/18/1979	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program III-c	S1
8	Sutarja, SE. NIP. 19681231 199011 1 005 Nganjuk, 12/31/1968	Kepala Seksi Kehumasan III-d	S1
9	Efa Nurdiana, ST NIP. 19830226 200604 2 018 Kediri, 02/26/1983	Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi Publik III-d	S1
10	Dian Arlesti Lukman, SH. MH. NIP. 19800102201001 2 014 Kediri, 1/2/1980	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik III-c	S2

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>Jabatan/Gol Ruang</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
11	Drs. Welly Markosa NIP. 19641028 198503 1 010 Kediri, 10/28/1964	Kepala Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik III-d	S1
12	Nuning Susilowati, S.Sos, MA. NIP. 19791210 200501 2 014 Kediri, 12/10/1979	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik IV-a	S2
13	Achmad Sholeh Mustaqim, ST MT. NIP. 19780910 200501 1 006 Kediri, 9/10/1978	Kepala Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi IV-a	S2
14	Ali Mun'im, S.Kom., M.Si. NIP. 19810308 200901 1 003 Kediri, 3/8/1981	Kasi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen III-d	S2
15	Agus Setiawan, SE. NIP. 19700813 199901 1 001 Kediri, 8/13/1970	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi III-d	S1
16	Yuli Kustyani, SE. NIP. 19690711 199803 2 007 Kediri, 7/11/1969	Pengadministrasi Keuangan III-d	S1
17	Rr. Endah Susilowati, S.Sos NIP. 19701003 199003 2 004 Jakarta, 10/3/1970	Penyusun Bahan Informasi III-d	S1
18	Moch. Yusup, ST. MT. NIP. 19771128 200312 1 005 Kediri, 11/28/1977	Operator Sandi Telekomunikasi IV-a	S2
19	Pitasari, S.Sos. NIP. 19720310 199903 2 005 Kediri, 3/10/1972	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program III-c	S1
20	Kartiyah, S.Sos. NIP. 19660421 199401 2 001 Kediri, 4/21/1966	Pengolah Data III-d	S1
21	Hartini NIP. 19640927 199210 2 001 Kediri, 9/27/1964	Pengelola Dokumentasi III-b	SMA
22	Achmad Hariyanto NIP. 19640426 198503 1 011 Kediri, 4/26/1964	Pengadministrasi Keuangan III-b	SMA
23	Yudha Yogi Prabawa, S.I.Kom. NIP. 19850620 201502 1 001 Kediri, 6/20/1985	Penyusun Berita dan Pendapat Umum III-b	S1

No.	Nama/NIP/Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan/Gol Ruang	Pendidikan Terakhir
24	Indah Angriani, S.Kom NIP. 19910825 201503 2 002 Rejang Lebong, 8/25/1991	Penyusun Berita dan Pendapat Umum III-a	S1
25	Sukma Fadly Nurlana, A.Md. NIP. 19830715 201001 1 040 Blitar, 7/15/1983	Pengelola Teknologi Informasi III-a	D3
26	M. Ali Zuhadi Maburr, A.Md. NIP. 19870520 201001 1 004 Kediri, 5/20/1987	Penyusun Berita dan Pendapat Umum III-a	D3
27	Hendra Setiawan, A.Md. NIP. 19880624 201101 1 003 Kediri, 6/24/1988	Pengelola Teknologi Informasi III-a	S1
28	Aniqotul Lutfiyah, A.Md. NIP. 19820611 201001 2 023 Kediri, 6/11/1982	Pengelola Kepegawaian III-a	D3
29	Aris Winarko NIP. 19750919 200901 1 009 9/19/1975	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana II-c	SMA
30	Sumadi NIP. 19800427 200901 1 010 Kediri, 4/27/1980	Bendahara III-a	S1
31	Rahmad Hidayat Hadi Subroto, S.Kom NIP. 19920610 202012 1 013 Kediri, 6/10/1992	Analisis Sistem Informasi III-a	S1
32	Andik yulianto NIP. 19800722 201212 1 003 Tulungagung, 22/07/1980	Pengolah Data II-c	SMA
33	Logika Prasasta Yoga NIP. 19821112 201001 1 004 Kediri, 11/12/1982	Pengolah Data II-c	SMA
34	Joko Suyoko, BA. NIP. 19651025 199203 1 004 Tulungagung, 10/25/1965	Pranata Humas III-c	D3
35	Ardy Novian Erwanda S.Kom NIP. 19941209 201903 1 006 Kediri, 12/09/1994	Analisis Sistem Informasi III-a	S1
36	Bagos Anggara A.Md NIP. 19910107 201903 1 007 Surabaya, 07/10/1991	Pengelola Teknologi Informasi II-c	D3
37	Arik Fefriyono A.Md NIP. 19870215 201903 1 005 Malang, 15/02/1987	Pengelola Keamanan Sistem Informasi II-c	D3
38	Veni Vianti NIP. 19850812 201408 2 004 Kediri, 12/08/1985	Pengadministrasi Keuangan II-b	SMA

39	Faisal Budi Aji, A.Md NIP. 19970426 202012 1 006 Kediri, 4/26/1997	Pengelola Teknologi Informasi II-c	D3
40	Gatot Siswoyo NIP. 19700329 201001 1 001 Kediri, 29/03/1970	Pengemudi II-c	SMA
<b>NON PNS (TENAGA HONORER)</b>			
1	Bety Delia Kediri, 6/12/1991	Tenaga Kontrak	S1
2	Joko Santoso Kediri, 1/26/1979	Tenaga Kontrak	SMK
3	Luke Septufuri Kediri, 9/19/1986	Tenaga Kontrak	S1
4	Didit Kurniawan Kediri, 3/25/1984	Tenaga Kontrak	SMK
5	Rikho G. Widyandoko Kediri, 8/25/1989	Tenaga Kontrak	S1
6	Febri Dwi Mutiarasari Kediri, 2/15/1995	Tenaga Kontrak	SMK
7	Sudjono Kediri, 7/21/1953	Tenaga Kontrak	SD
8	Sukarno Kediri, 11/13/1975	Tenaga Kontrak	STM
9	Brian Adi Tama Putra Kediri, 5/8/1990	Tenaga Kontrak	S1
10	Paskan Adi Tama Putra Kediri, 5/8/1990	Tenaga Kontrak	S1
11	Dian Ayu Herawati Kediri, 3/4/1992	Tenaga Kontrak	S1
12	Chula Chusnita Kediri, 1/27/1993	Tenaga Kontrak	S1
13	Wisnu Setiawan Kediri, 8/31/1982	Tenaga Kontrak	SMK
14	Danang Adikrisna Kediri, 11/23/1990	Tenaga Kontrak	S1
15	One Ulfi Safitri Kediri, 12/03/1997	Tenaga Kontrak	S1
16	Puput Ariyanti Kediri, 7/14/1995	Tenaga Kontrak	S1
17	Muhammad Fauzi Amrulloh Kediri, 6/12/1993	Tenaga Kontrak	S1
18	Mohammad Yanuar Setya Wibowo Kediri, 02 /01/1993	Tenaga Kontrak	S1
19	Jeremy Candra Pranata Kediri, 01/03/1996	Tenaga Kontrak	S1
20	Doni Setiyo Budi Santoso Kediri, 5/08/1991	Tenaga Kontrak	S1
21	R. Raxy Indrianto Pratama Kediri, 7/08/1996	Tenaga Kontrak	D3
22	David Chrisna Valentino Kediri, 25/10/1993	Tenaga Kontrak	S1

23	Bagas Prasetya Putra Kediri, 19/04/1992	Tenaga Kontrak	S1
24	Aadhan Jorghi Kresnawan Kediri, 18/08/1996	Tenaga Kontrak	S1
25	Saiul Ridwan Jombang, 24/04/1991	Tenaga Kontrak	S1
26	Evi Merdika Listiani Madiun, 07/08/1997	Tenaga Kontrak	S1
27	Elly Hajar Mastrin Probolinggo, 18/01/1997	Tenaga Kontrak	S1
28	Meyrinda Tobing Kediri, 24/05/1995	Tenaga Kontrak	S1
29	Oky Cicilia Damayanti Kediri, 22/03/1996	Tenaga Kontrak	SMK
30	Supriyadi Kediri, 4/03/1975	Tenaga Kontrak	S1
31	Muhammad Husnul Yaqin Kediri, 17/10/1991	Tenaga Kontrak	S1
32	Ardhian Ahmadi Kediri, 7/05/1996	Tenaga Kontrak	S1
33	Muhyi Irmawan Kediri, 5/08/1993	Tenaga Kontrak	S1
34	Erzha Yuli Triapanta Nganjuk, 13/07/1995	Tenaga Kontrak	S1
35	Ardy Febri Sustrissyah Kendal, 15/02/1998	Tenaga Kontrak	S1
36	Rizal Mustiko Adji Kediri, 18/07/1998	Tenaga Kontrak	S1

## D.2 Sumber Daya Anggaran

Untuk melaksanakan kinerja tahun 2021, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.095.425.575,75. Untuk belanja operasional dapat dirinci per-program sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Alokasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2021**

NO	PROGRAM	DANA
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.018.003.375,75</b>
2.	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>12.159.794.500</b>
3.	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>4.027.550.700</b>
4.	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>179.864.200</b>
5.	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>710.212.800</b>
	<b>J U M L A H</b>	<b>33.095.425.575,75</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021.

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### A.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. **Terwujudnya**, yaitu menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri.
- b. **Ketahanan Pangan**, yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
- c. **Masyarakat Kabupaten Kediri**, yaitu satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kediri.
- d. **Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan**, yaitu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya. Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
- e. **Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional**, yaitu melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi, yaitu :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.

11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
- 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.**
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah misi ke-13 Bupati Kediri yaitu “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri adalah :

1. Meningkatkan sistem informasi pemerintah daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat

Tujuan ini selaras dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD 2016-2021 untuk “Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi.”

## **A.2 Sasaran**

Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri bidang informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD yaitu “Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah”.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government

*Indikator Kinerja Sasaran :*

- Persentase OPD yang berbasis e-government
  - Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi
  - Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

*Indikator Kinerja Sasaran :*

- Persentase desa yang membentuk KIM
- Persentase PPID aktif pada OPD

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

*Indikator Kinerja Sasaran :*

- Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi
- Jumlah update pada media pemerintah daerah
- Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab

### **A.3 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan bidang informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, yang digunakan sebagai acuan perencanaan tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dari sisi kelembagaan, pembangunan infrastruktur, maupun sistem aplikasi teknologi informasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang lebih aktif dan profesional
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi desa melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
4. Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media pemerintah, media massa, maupun media sosial
5. Pemberdayaan informasi masyarakat melalui publikasi isu-isu strategis dalam kegiatan Bakoinmas, pertunjukan rakyat, atau festival.

## **B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut maka Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menyusun 5 program, 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - Penatalaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
  - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Pengamanan barang milik daerah SKPD
  - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- g. Administrasi umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

## **2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
  - Monitoring opini dan aspirasi publik
  - Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
  - Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
  - Pengelolaan media komunikasi publik
  - Pelayanan informasi publik
  - Layanan hubungan media
  - Penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
  - Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
  - Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas

## **3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
  - Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
  - Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas
  - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
  - Pengelolaan government chief information officer (GCIO)
  - Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah

## **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral
  - Membangun metadata statistik sektoral

## 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

**Tabel 3**  
**Program/Kegiatan dan Indikator *Output* dan *Outcome***

NO	KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Terpenuhinya Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemda yang disediakan</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemda yang disediakan</b>
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
<b>2.</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
2.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pajak dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
<b>3.</b>	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Tersedianya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>

3.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat
3.2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
<b>4.</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>
4.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
4.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Waktu administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN
4.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
4.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD
4.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD
4.6	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
<b>5.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>
5.1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD
5.2	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

<b>6.</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>
6.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
<b>7.</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>
7.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
7.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Tersedianya peralatan rumah tangga
7.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya bahan logistik kantor
7.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan layann informasi yang terkelola</b>	<b>Cakupan layann informasi yang terkelola</b>

<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi yang dikelola</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Informasi Publik</b>
1.1	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah peserta monitoring opini dan aspirasi publik	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik
1.2	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah peserta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
1.3	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang dikelola	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
1.4	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik
1.5	Pelayanan informasi publik	Jumlah kerjasama dengan media elektronik dan portal online	Tersedianya pelayanan informasi publik
1.6	Layanan hubungan media	Jumlah kerja sama dengan media cetak	Tersedianya layanan hubungan media
1.7	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah peserta pelatihan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik
1.8	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan sinkronisasi PPID	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
1.9	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah peserta bakoinmas	Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat media dan kemitraan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan
<b>C.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah</b>

<b>1.</b>	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan sistem informasi daerah</b>
1.1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
1.2	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Uptime layanan pusat data untuk SKPD Kabupaten Kediri	Terkelolanya pusat data pemerintahan daerah
1.3	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
1.4	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas	Jumlah Aparatur /masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas
1.5	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
1.6	Pengelolaan government chief information officer (GCIO)	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	Terlaksananya Pengelolaan government chief information officer (GCIO)
1.7	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
<b>D</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>Tersedianya Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah</b>	<b>Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah</b>

1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral
1.2	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistic sektoral	Terbangunnya metadata statistik sektoral
<b>E.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Cakupan keamanan persandian dan TI</b>	<b>Cakupan keamanan persandian dan TI</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman</b>	<b>Tersedianya informasi sandi dan sistem informasi yang aman</b>
1.1	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik yang aman	Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran dan target masing masing indikator yang akan dicapai dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisa target yang telah dicapai pada masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Sesuai RPJMD 2016-2021, capaian kinerja sasaran dan tujuan Pemkab Kediri Tahun 2021 yang menjadi wewenang Dinas Kominfo bisa digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Data Realisasi Kinerja Sasaran Pemkab Kediri Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target RPJMD	KINERJA			
				2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kumulatif sistem informasi yang dibangun	4	4	4	22	550% dari target RPJMD

Tahun 2021 membangun sistem informasi :

1. smkt-bagum.kedirikab.go.id
2. sadapdisdik.kedirikab.go.id
3. kedirimenang.kedirikab.go.id
4. perpustakaan.kedirikab.go.id
5. sidamis.kedirikab.go.id
6. simtaru.kedirikab.go.id
7. silvi.kedirikab.go.id

8. kianprima.kedirikab.go.id
9. e-sakip.kedirikab.go.id
10. mapanji.kedirikab.go.id
11. e-sppt.kedirikab.go.id
12. simpatda.kedirikab.go.id
13. esptpd.kedirikab.go.id
14. dash-pajak.kedirikab.go.id
15. e-layanan.kedirikab.go.id
16. epotensi.kedirikab.go.id
17. esig.kedirikab.go.id
18. sipanji.kedirikab.go.id
19. sappakop.kedirikab.go.id
20. aktivasidukcapil.kedirikab.go.id
21. pemdes.kedirikab.go.id

Jumlah Sistem Informasi yang dibangun melebihi target yang ditentukan karena tuntutan kebutuhan SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk rencana tindak lanjutnya akan dibangun Sistem Informasi sesuai yang ada pada roadmap SPBE.

**Tabel 5**  
**Realisasi Indikator Tujuan Daerah Tahun 2021**

NO	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN		
			2019	2020	2021
1.	<b>Jumlah Ruang Publik yang Terlayani Free Wifi</b>				
	a. Target	Jumlah	82	91	100
	b. Realisasi		20	20	51
	c. Capaian (b:a)		24,39%	21,97%	51%

Titik lokasi ruang publik yang terlayani free wifi di wilayah Kabupaten Kediri adalah

1. Taman Ngadiluwih (2 titik)
2. SKB (1 titik)
3. Taman Garuda/Taman PMI (1 titik)
4. Perpustakaan Pare (2 titik)
5. Pasar grosir (1 titik)
6. Alun-alun Ringinbudo Pare (1 titik)
7. RSUD Pare (2 titik)
8. Area SLG (4 titik)
9. RSUD Gumul (2 titik)
10. BPM2TSP (1 titik)
11. Lobby Sekda (1 titik)
12. Aula Capilduk (1 titik)
13. GNOTA Burengan (1 titik)
14. Rest Area Gunung Kelud (1 titik)
15. Wisata Ubalan (1 titik)
16. Wisata Besuki (1 titik)
17. Pendopo (1 titik)
18. Joglo (1 titik)
19. Kecamatan (26 titik)

Layanan free wifi di ruang publik masih kurang dari yang ditargetkan namun layanan free wifi di ruang publik yang terbangun sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruang publik dengan mempertimbangkan fungsi strategis yang ada di area layanan tersebut diberikan. Untuk rencana tindak lanjutnya dengan meningkatkan kualitas layanan free wifi di ruang publik dan menambah titik lokasi ruang publik yang terlayani free wifi.

Sedangkan capaian kinerja strategis Dinas Kominfo tahun 2021 bisa digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government	Persentase SKPD yang berbasis e-government	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	20	100	51	51%
		Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	510 Mbps	1 Gbps	510 Mbps	51%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Persentase desa yang membentuk KIM	57,8%	100%	57,8%	57,8%
		Persentase PPID aktif pada SKPD	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	785/tahun	600/tahun	965/tahun	160%
		Jumlah update pada media pemerintah daerah	10 kali/hari	10 kali/per hari	10 kali/per hari	100%
		Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab ( <i>content viewer</i> )	18,6jt/tahun	20jt/tahun	19,2jt/tahun	96%

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo diatas bisa dijelaskan sebagai berikut

:

### 1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government

- a. Persentase SKPD yang berbasis e-Government mencapai 100%, menggambarkan seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 65 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sector.
- b. Jumlah ruang publik yang terlayani wifi sebanyak 51 titik, hanya mencapai 51% kurang dari yang ditargetkan di tahun 2021 sebanyak 100. Namun layanan free wifi di ruang publik yang terbangun sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruang publik dengan mempertimbangkan fungsi strategis yang ada di area layanan tersebut
- c. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 1 Gbps tercapai 51% yaitu 510 Mbps, sama seperti tahun 2020. Meskipun secara kinerja mencapai 51% dari target namun tingkat kecepatan ini sudah

memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

## **2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik**

- a. Persentase desa yang membentuk KIM mencapai 57,8%. Saat ini kegiatan KIM lebih difokuskan pada pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada, untuk memaksimalkan potensinya.
- b. Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik. Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.

## **3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik**

- a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi mencapai 160%. Dari yang ditargetkan 600/tahun terealisasi 965/tahun.
- b. Jumlah update pada media pemerintah daerah terealisasi sebesar 100%. Masih sama dengan tahun 2020 yaitu mencapai 10 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
- c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (*content viewer*) di tahun 2021 terealisasi 96% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, yaitu dari 18,6jt/tahun menjadi 19,2jt/tahun.

Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2021 yang capaian kinerjanya bisa dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah 100% terealisasi 100%. Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang Disediakan target 12 bulan terealisasi 12 bulan.
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target 30 Unit terealisasi 30 Unit.

- c. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen.
- d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 20 dokumen terealisasi 20 dokumen.
- e. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- f. Administrasi umum perangkat daerah. Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 30 dokumen terealisasi 30 dokumen.
- g. Administrasi kepegawaian perangkat daerah. Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 50 % terealisasi 0,95%

## **2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Dengan indikator program yaitu Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah informasi yang terkelola dengan target 825 konten terealisasi 965 konten.

## **3. Program Aplikasi Informatika**

Dengan indikator program yaitu Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :

- a. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola dengan target 170 sistem terealisasi 170 sistem informasi.

## **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Dengan Indikator program yaitu ketersediaan statistik sektoral dilingkup daerah dengan target terdapat ketersediaan statistik sektoral dan terealisasi dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :

- a. Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota. Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah dengan target 1 paket data statistik sektoral terealisasi 1 paket data statistik sektoral.

**5. Program Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi**

Dengan indikator program yaitu jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman dengan target 1 paket terealisasi 1 paket.

**Tabel 7**  
**Realisasi Outcome Program/Output Kegiatan Dinas Kominfo**  
**Tahun 2021**

NO.	KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang Disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>2.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>30 Unit</b>	<b>30 Unit</b>	<b>100%</b>
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	100%

	Kendaraan Dinas Jabatan				
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Peralatan/Mesin	16 Peralatan/Mesin	100%
<b>3.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>100%</b>
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
3.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
<b>4.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>100%</b>
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100%
4.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Bulan	13 Bulan	100%
4.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100%
4.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2 Laporan	100%
<b>5.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100%</b>

5.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
5.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50%</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,90%</b>
6.1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana	12 kegiatan	1 kegiatan	8,33%
<b>7.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30 dokumen</b>	<b>30 dokumen</b>	<b>100%</b>
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	4 komponen	4 komponen	100%
7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 peralatan/pe rlengkapan	4 peralatan/perl engkapan	100%
7.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 peralatan	4 peralatan	100%
7.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	4 peralatan/pe rlengkapan	4 peralatan/perl engkapan	100%
7.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 barang cetakan/pen ggandaan	4 barang cetakan/peng gandaan	100%
7.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 bahan	4 bahan	100%
<b>7.7</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan</b>	<b>20 rapat koordinasi/ konsultasi</b>	<b>11 rapat koordinasi/ konsultasi</b>	<b>55%</b>
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi yang Terkelola</b>	<b>825 Konten</b>	<b>965 Konten</b>	<b>116,97%</b>
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 Orang	30 Orang	50%
1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 Orang	40 Orang	50%
1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang dikelola	825 Konten	965 Konten	116,97%
1.4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Jaringan Komunikasi	6 Kegiatan	1 Kegiatan	16,67%
1.5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kerjasama dengan Media elektronik dan Portal Online	60 Media Elektronik dan Portal Online	60 Media Elektronik dan Portal Online	100%
1.6.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama dengan Media Cetak	50 Media Cetak	35 Media Cetak	70%
1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 Orang	34 Orang	43,75%
1.8.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 Orang	0 Orang	0 %
1.9.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Peserta Bakoinmas	130 orang	40 orang	30,77%
<b>C.</b>	<b>Program Pengelola Aplikasi Informatika</b>	<b>Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi pemerintah daerah yang terkelola</b>	<b>170 sistem Informasi</b>	<b>170 sistem Informasi</b>	<b>100%</b>
1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam	Jumlah Kegiatan Monitoring dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	evaluasi SPBE Kab. Kediri			
1.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Uptime Layanan Pusat Data untuk SKPD Kab. Kediri	95%	95%	100%
1.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Aparatur / Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan TI	150 Aparatur Dan Masyarakat	200 Aparatur	133,33%
1.5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi yang Terpelihara Baik	6 Paket	6 Paket	100%
1.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	1 paket	0 paket	0%
1.7	Penyelenggaraan Sistem komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE Kab. Kediri	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
<b>D.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah</b>	<b>1 Paket data statistik sektoral</b>	<b>1 Paket data statistik sektoral</b>	<b>100%</b>
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi Perihal Membangun Metadata Statistik Sektoral	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
<b>E</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Cakupan Keamanan Persandian dan TI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi Sandi dan Sistem Informasi yang aman</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 Paket	1 Paket	1 Paket

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan kinerja tahun 2021, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.095.425.575,75 terdiri dari Pajak Rokok Rp. 5.200.000.000,00 , DBHCHT Rp. 8.575.160.825,75 dan DAU Rp. 19.320.264.750,00.

Realisasi penyerapan dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2021 adalah Rp. 16.637.405.322,00 atau sebesar 50,27% Adapun realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan secara rinci dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 8**

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2021**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>DANA (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAI AN (%)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.018.003.375,75</b>	<b>6.403.414.182</b>	<b>39,98jhg g%</b>	<b>DAU</b>
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>396.575.000</b>	<b>286.329.788</b>	<b>72,20%</b>	<b>DAU</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100%	DAU
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	394.175.000	283.929.788	72,03%	DAU
<b>2.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.821.000</b>	<b>95.527.893</b>	<b>57,96%</b>	<b>DAU</b>
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.421.000	54.255.310	58,08%	DAU

2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.400.000	41.272.583	57,80%	DAU
<b>3.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4,240,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>28,30%</b>	<b>DAU</b>
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,270,000	450,000	13,76%	DAU
3.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	970,000	750,000	77,32%	DAU
<b>4.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,405,529,600</b>	<b>5,646,198,104</b>	<b>88,15%</b>	<b>DAU</b>
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,882,904,600	4,335,845,448	88,80%	DAU
4.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,458,660,000	1,251,242,656	85,78%	DAU
4.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,760,000	56,960,000	93,75%	DAU
4.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,450,000	1,450,000	100%	DAU
4.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,280,000	600,000	46,88%	DAU
4.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	475,000	100,000	21,05%	DAU

	Realisasi Anggaran				
<b>5.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>113,200,000</b>	<b>106,306,979</b>	<b>93,91%</b>	<b>DAU</b>
5.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	98,506,979	98,51%	DAU
5.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,200,000	7,800,000	59,09%	DAU
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8,575,160,825.75</b>	<b>81,300,000</b>	<b>0.95%</b>	<b>DBHCHT</b>
6.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8,575,160,825.75	81,300,000	0.95%	DBHCHT
<b>7.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>358,476,950</b>	<b>186,551,418</b>	<b>52,04%</b>	<b>DAU</b>
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,805,750	2,324,450	40,04%	DAU
7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,439,800	67,210,400	63,74%	DAU
7.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,150,400	16,197,300	57,54%	DAU
7.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,325,000	16,379,000	50,67%	DAU
7.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,997,000	11,230,000	32,09%	DAU
7.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26,580,000	22,196,000	83,51%	DAU
7.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	125,179,000	51,014,268	40,75%	DAU

	dan Konsultasi SKPD				
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>12.159.794.500</b>	<b>6.347.246.710</b>	<b>52,20%</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</b>	<b>12,159,794,500</b>	<b>6,347,246,710</b>	<b>52,20%</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	24,222,000	15,185,000	62,69%	DAU
1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	23,845,000	15,198,000	63,74%	DAU
1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	235,000,000	87,828,590	37,37%	DAU dan Pajak Rokok
1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	58,185,000	4,420,000	7,60%	DAU
1.5	Pelayanan Informasi Publik	5,005,000,000	2,825,591,900	56,46%	DAU dan Pajak Rokok
1.6	Layanan Hubungan Media	6,714,935,000	3,377,924,220	50,30%	DAU dan Pajak Rokok
1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	22,375,000	12,952,000	57,89%	DAU
1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	43,832,500	771,000	1,76%	DAU
1.9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32,400,000	7,376,000	22,77%	DAU
<b>C.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>4.027.550.700</b>	<b>3.407.773.982</b>	<b>84,61%</b>	<b>DAU</b>

<b>I.</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,027,550,700</b>	<b>3,407,773,982</b>	<b>84,61%</b>	<b>DAU</b>
1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,150,000	89,047,000	90,73%	DAU
1.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2,783,105,800	2,680,497,300	96,31%	DAU
1.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	331,989,000	164,537,100	49,56%	DAU
1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	122,881,100	72,872,182	59,30%	DAU
1.5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	361,924,800	252,570,400	69,79%	DAU
1.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	100,000,000	-	-	DAU
1.7	Penyelenggaraan Sistem komunikasi Intra Pemerintah Daerah	229,500,000	148,250,000	64,6%	DAU
<b>D.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>179.864.200</b>	<b>149.342.548</b>	<b>83,03%</b>	<b>DAU</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik</b>	<b>179,864,200</b>	<b>149,342,548</b>	<b>83,03%</b>	<b>DAU</b>

	<b>Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	174,955,800	149,342,548	85,36%	DAU
1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	4,908,400	-	-	DAU
<b>E.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>710.212.800</b>	<b>329.627.900</b>	<b>46,41%</b>	<b>DAU</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>710,212,800</b>	<b>329,627,900</b>	<b>46,41%</b>	<b>DAU</b>
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	710,212,800	329,627,900	46,41%	DAU
	<b>TOTAL</b>	<b>33,095,425,575.75</b>	<b>16,637,405,322</b>	<b>50,27%</b>	

## C. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

### C.1 Keberhasilan

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri dapat dilihat dari poin-poin berikut ini :

1. Membangun sistem jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung seluruh SKPD dalam memberikan pelayanan berbasis e-Government. Sampai tahun 2021 Dinas Kominfo berhasil membangun 22 sistem informasi dan komunikasi, disamping juga mencukupi kebutuhan layanan bandwidth.

2. Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi ditargetkan 21 titik terealisasi 51 titik.
3. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang ditargetkan terpublikasi 600/tahun terealisasi 965/tahun.
4. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab(*content viewer*) meningkat dari 18,6 juta di tahun 2020 menjadi 19,2 juta di tahun 2021.

## **C.2 Permasalahan**

Berdasar dari pencapaian indikator kinerja Dinas Kominfo tahun 2021 berikut permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri :

1. Keamanan sistem jaringan masih belum maksimal dengan adanya gangguan seperti hacker, dsb.
2. Pembentukan KIM belum mencapai seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kediri. Saat ini lebih difokuskan untuk pembinaan KIM yang sudah ada karena dampak pandemi
3. Meskipun ada kenaikan pengunjung website pemerintah daerah (*content viewer*) dari tahun 2020 ke tahun 2021 namun jumlah ini masih kurang dari yang ditargetkan. Dari 20 juta/tahun baru mencapai 96% atau 19,2 juta pengunjung.
4. Kurangnya sosialisasi terkait peran PPID di Kabupaten Kediri terhadap masyarakat
5. Dampak pandemi dan refofusing anggaran menyebabkan kegiatan tidak berjalan lancar dan serapan anggaran rendah.

## **C.3 Solusi**

Berikut solusi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo untuk permasalahan yang dihadapi :

1. Meningkatkan keamanan sistem jaringan informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan firewall.
2. Meningkatkan pembentukan KIM di desa-desa dengan memprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sektor wisata dan UMKM.

3. Meningkatkan kualitas website pemerintah daerah melalui pembenahan desain baik dari sisi tampilan maupun kemudahan akses dan fitur serta meningkatkan kelengkapan *content* atau database yang termuat di dalam website pemerintah daerah.
4. Memberikan sosialisasi terhadap adanya PPID pada pemerintah Kabupaten Kediri kepada masyarakat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun 2021 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo secara umum relatif sesuai dengan target, sasaran, tujuan, jadwal dan penganggaran yang direncanakan.
2. Kinerja Dinas Kominfo ditinjau dari aspek realisasi anggaran hanya mencapai 50,27% karena situasi pandemi covid-19 dan masa transisi pergantian pimpinan (kepala dinas).
3. Ditinjau dari aspek pelaksanaan kegiatan, hampir semua kegiatan dari seluruh program yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun dalam situasi pandemi Covid 19 beberapa kegiatan seperti pelatihan atau sosialisasi belum bisa dilaksanakan.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran baik sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri maupun sasaran kinerja Dinas Kominfo relatif stabil dan beberapa mengalami peningkatan.
5. Ditinjau dari aspek keorganisasian Dinas Komunikasi dan Informatika meskipun telah cukup efektif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan sumberdaya yang tersedia cukup baik dari sisi ketersediaan anggaran, sumber daya sarana dan prasaranan maupun sumber daya manusia yang ada.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran untuk peningkatan kualitas kinerja Dinas Kominfo sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan implementasi SPBE baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun integrasi sistem aplikasi dan security jaringan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja bidang komunikasi dan informatika melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, peningkatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi sistem

informasi dan komunikasi, serta meningkatkan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media massa, media pemerintah, maupun media social

3. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan bidang teknologi informasi baik di lingkup internal maupun masyarakat.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kominfo.

Kediri, Desember 2021



**IBNU IMAD, S.Sos**

Pembina/IV-a

NIP. 19721010 200501 1 014